**Journal of Authentic Research**
https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/index

August 2026 Vol. 5, No. 3
e-ISSN: 2828-3724
pp. 7212-7226

# Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang

**[1*] Naya Fitri Zahwa, [2] Adil Mubarak**

[1]Departemen Ilmu A bmdministrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: nayafitrizahwa@gmail.com

*Received: May 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026*

**Abstrak**

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama keberlanjutan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama pada wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti DAS Batang Kuranji, Kota Padang, yang mengalami banjir bandang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji yang difasilitasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan enam informan dari BWS Sumatera V, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Komunitas Peduli Sungai (KPS), tokoh adat, dan masyarakat sekitar aliran sungai, yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dianalisis berdasarkan empat indikator partisipasi masyarakat: bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, partisipasi langsung dan tidak langsung, serta keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi didominasi tenaga dan gagasan, sedangkan partisipasi dana dan material sangat minim; tingkat partisipasi meningkat bertahap dari informasi, konsultasi, hingga keputusan, tetapi timpang antara wilayah dengan KPS aktif dan tidak aktif; partisipasi langsung terkonsentrasi pada wilayah dengan KPS aktif; serta evaluasi partisipatif pascaprogram hampir tidak ditemukan. Faktor pendukung meliputi keberadaan KPS dan tokoh masyarakat aktif, budaya gotong royong, kesadaran kolektif akibat pengalaman bencana, dan keterbukaan pemerintah untuk berkolaborasi, sementara faktor penghambat meliputi pemangkasan anggaran pembinaan KPS, perbedaan persepsi tentang kemandirian pendanaan, keterbatasan ekonomi dan pengetahuan teknis masyarakat, serta pemerataan informasi yang belum optimal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kerangka Arnstein, Pretty, serta Cohen dan Uphoff pada konteks DAS tropis rawan bencana, khususnya melalui analisis ketimpangan partisipasi antarwilayah dan relasi kuasa dalam tata kelola sungai.

**Kata Kunci**: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan, DAS Batang Kuranji, Komunitas Peduli Sungai (KPS).

**How to Cite:** Zahwa, N. F., & Mubarak, A. (2026). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang. *Journal of Authentic Research*, *5*(3), 7212–7226. https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6870

https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6870

Copyright© 2026, Zahwa et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama pada kawasan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air seperti Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu ekosistem kompleks yang terdiri atas komponen biofisik, sosial-ekonomi, dan kelembagaan yang saling terkait, sehingga pengelolaannya memerlukan pendekatan terpadu (integrated watershed management) yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan (Asdak, 2023). Kerusakan DAS tidak hanya menimbulkan degradasi ekologis, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sepanjang alirannya. Dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan lokal, dan kapasitas untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan (Maryani & Putra, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang telah lama dikembangkan oleh para ahli. Arnstein (1969) dalam tangga partisipasi (ladder of participation) membedakan delapan tingkat partisipasi, mulai dari manipulasi hingga kendali masyarakat penuh (citizen control), yang menegaskan bahwa partisipasi sejati menuntut redistribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pretty (1995) mengidentifikasi tujuh tipologi partisipasi, dari partisipasi manipulatif hingga partisipasi swa-mobilisasi (self-mobilization), sedangkan Cohen dan Uphoff (1980) membedakan partisipasi dalam empat dimensi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, penerimaan manfaat, dan evaluasi. Ketiga kerangka teoretis tersebut menegaskan bahwa kualitas partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran fisik semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap informasi, ruang konsultasi, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Keempat indikator operasional dalam penelitian ini diturunkan dari tiga kerangka teoretis. Bentuk partisipasi (tenaga, gagasan, dana, dan material) diadaptasi dari Cohen dan Uphoff (1980) tentang kontribusi dalam implementasi; tingkat partisipasi dari Arnstein (1969) dan Pretty (1995); partisipasi langsung dan tidak langsung dari tipologi Pretty (1995) serta Cohen dan Uphoff (1980); sedangkan keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi dari dimensi evaluasi Cohen dan Uphoff (1980) dan tangga partisipasi Arnstein (1969). Pemilihan indikator ini dilakukan karena penelitian tidak hanya mengukur kehadiran, tetapi juga kualitas akses, ruang konsultasi, dan kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Secara operasional, partisipasi masyarakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji, yang diukur melalui empat indikator: (1) bentuk partisipasi, meliputi tenaga, gagasan, dana, dan material; (2) tingkat partisipasi, mulai dari penyampaian informasi, konsultasi, hingga pengambilan keputusan; (3) partisipasi langsung dan tidak langsung; serta (4) keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi ditafsirkan sebagai cerminan modal sosial masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemerintah.

Permasalahan tersebut terjadi secara nyata pada DAS Batang Kuranji di Kota Padang. Sungai ini merupakan salah satu DAS pada Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman dengan luas sekitar 202,7 km² yang terdiri atas lima sub-DAS, dengan panjang sungai utama sekitar 32 kilometer yang mengalir melintasi kawasan permukiman padat dengan topografi terjal. Karakteristik topografi serta material dasar dan tebing sungai yang mudah terkikis menjadikan Batang Kuranji rawan terhadap banjir bandang atau galodo. Banjir bandang tercatat terjadi pada tahun 1988 dan 16 Maret 2008, disusul banjir di kawasan Batu Busuk pada tahun 2023 yang merusak rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Tekanan terhadap DAS meningkat tajam sejak tahun 2025. Banjir bandang pada 26–27 November 2025 akibat curah hujan ekstrem di hulu menaikkan elevasi dasar sungai sebesar 1–2 meter karena

sedimentasi, menimbulkan korban jiwa, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Pada 3 Agustus 2026, curah hujan ekstrem sebesar 384,5 mm dalam 10 jam kembali merendam 15 lokasi di enam kecamatan (diolah dari Kementerian PU, WALHI Sumatera Barat, dan pemberitaan media massa, 2025–2026). Kajian awal BWS Sumatera V dan WALHI Sumatera Barat (2025) menunjukkan bahwa kapasitas dan fungsi Sungai Batang Kuranji telah berkurang hingga hampir 50%.

Selain faktor alamiah, kerusakan DAS Batang Kuranji juga diperparah oleh aktivitas manusia. BWS Sumatera V (2025) mengidentifikasi bahwa tingginya potensi kebencanaan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh penambangan material galian C yang merusak bangunan air dan pelindung tebing akibat gerusan lokal, sedangkan WALHI Sumatera Barat (2025) menemukan minimnya infrastruktur pengendali lingkungan di area tambang seperti drainase pengendali limpasan dan kolam pengendapan. Permukiman di sempadan sungai turut meningkatkan risiko keselamatan warga saat terjadi banjir bandang. Sebagai respons, BWS Sumatera V (2025) menyusun program penanganan banjir dan sedimen secara bertahap menurut segmen sungai, berupa pembangunan checkdam di hulu, penanganan kerusakan akibat galian C di segmen tengah, serta pembangunan tanggul dan normalisasi di hilir. Namun, pelaksanaan program tersebut terkendala persoalan lahan, karena sebagian masyarakat belum menyetujui penggunaan lahannya untuk pembangunan infrastruktur sungai maupun akses menuju lokasi pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyediaan lahan, menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program.

Upaya pemerintah tersebut sulit memberikan dampak jangka panjang tanpa partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial dalam pengelolaan DAS karena masyarakat adalah penerima manfaat sekaligus penjaga kelestarian lingkungan di tingkat tapak (Wafa et al., 2024). Tanpa partisipasi, program pemerintah cenderung bersifat teknokratis dan tidak berkelanjutan (Mustofa, 2026). BWS Sumatera V telah membentuk lima Komunitas Peduli Sungai (KPS) di sepanjang DAS, yaitu KPS Gunung Nago, KPS Kalumbuk, KPS Korong Gadang, KPS Guo, dan KPS Sungai Sapih, yang kegiatannya sebagian besar berupa bersih sungai. Pada awal tahun 2026, pemerintah bersama mahasiswa, aktivis, dan komunitas lingkungan juga menginisiasi gerakan penanaman 10.000 pohon pada empat DAS utama di Kota Padang (Pemerintah Kota Padang, 2026). Meskipun demikian, KPS yang ada menghadapi kendala berupa kurang aktifnya anggota, keterbatasan dana, dan rendahnya partisipasi masyarakat secara umum, sementara keberlanjutan partisipasi di luar momentum tanggap darurat bencana masih dipertanyakan. Selain itu, dokumentasi mengenai capaian program per KPS dan pola kerja sama BWS dengan masyarakat belum dipublikasikan secara terbuka, sehingga pola komunikasi dan pelibatan masyarakat belum dapat dipastikan berjalan secara terstruktur dan akuntabel.

Kewajiban melibatkan masyarakat dalam pengelolaan DAS sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, khususnya Pasal 57 sampai Pasal 60, menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta secara perorangan

maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS, baik dalam menjaga kualitas lingkungan, memberikan informasi dan saran, maupun menjalankan fungsi pengawasan. Pada tingkat daerah, komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2025–2029, termasuk Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang memuat arah kebijakan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2025–2029 menjadi dasar hukum daerah yang relevan. Berdasarkan uraian tersebut, timbul kesenjangan antara kerangka regulasi dan perencanaan yang mengamanatkan pelibatan masyarakat secara aktif dengan kondisi di lapangan, yaitu partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian DAS Batang Kuranji yang masih belum optimal, bersifat sporadis, dan bergantung pada momentum bencana. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik yang berdekatan. Agusti dan Wibawani (2023) meneliti partisipasi masyarakat pada kampung edukasi sampah secara kuantitatif melalui variabel kesempatan, kemauan, dan kemampuan berpartisipasi. Suhendra et al. (2024) mengkaji strategi pemerintah dalam pengelolaan DAS Mahakam, sedangkan Astomo (2021) menelaah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Mandar dengan pendekatan sosio-legal. Fajeriadi et al. (2024) mengkaji edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat sekitar sungai melalui studi literatur, dan Handiny dan Ulva (2025) meneliti pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi di Kelurahan Kuranji. Pada aliran Batang Kuranji sendiri, Mutia dan Muchtar (2019) telah mengkaji peran komunitas peduli lingkungan melalui studi pada KPS Kalumbuk. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji yang difasilitasi BWS beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Studi terkini menegaskan bahwa partisipasi formal belum otomatis substantif (Mustofa, 2026) dan sangat dipengaruhi kapasitas kelembagaan lokal, akses informasi, serta pola kolaborasi antarpemangku kepentingan (Ginting et al., 2024; Mahlella, 2025; Zulhadi et al., 2023; Zulkarnaen, 2023). Partisipasi juga penting dalam pembentukan kebijakan (Azmi & Yamani, 2025), perencanaan pembangunan desa (Machmud et al., 2025), dan pemetaan partisipatif infrastruktur permukiman (Yunginger & Patuti, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kualitatif partisipasi masyarakat dengan membandingkan dua KPS yang memiliki tingkat keaktifan berbeda, serta mengaitkannya dengan kerangka teoretis partisipasi Arnstein, Pretty, dan Cohen & Uphoff. Penelitian ini menawarkan kebaruan kontekstual dan analitis, bukan klaim bahwa belum pernah ada penelitian serupa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji Kota Padang, yang dianalisis melalui indikator bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, partisipasi langsung dan tidak langsung, serta keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat tersebut.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian berupaya mendeskripsikan fenomena secara holistik dan mendalam mengenai bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat, kontribusi masyarakat dalam menjaga kelestarian DAS, serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi, tanpa melakukan manipulasi terhadap setting alamiah (Sugiyono, 2023). Lokasi penelitian mencakup segmen hilir, tengah, dan hulu DAS Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan fokus pada wilayah KPS Guo dan KPS Kalumbuk serta instansi BWS Sumatera V dan DLH Kota Padang.

### Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data secara selektif berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan yang mendalam dan peran atau kedudukan yang relevan dengan topik yang diteliti (Sugiyono, 2023). Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang. Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Sumber Daya Air pada Satuan Kerja BWS Sumatera V Padang, dipilih karena perannya secara langsung dalam program pengelolaan sungai dan pelibatan masyarakat. Kedua, Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Ketiga, Ketua KPS Guo yang tergolong aktif. Keempat, Ketua KPS Kalumbuk yang tergolong tidak aktif. Kelima, tokoh masyarakat yang menjabat Ketua Kerapatan Adat Nagari. Keenam, warga yang bermukim di sekitar aliran Sungai Batang Kuranji. Jumlah enam informan ditentukan karena penelitian ini berfokus pada aktor kunci dalam rantai kebijakan dan implementasi partisipasi; wawancara dihentikan ketika data dari lintas aktor menunjukkan pola yang berulang dan tidak muncul tema baru yang substantif (saturasi data), khususnya mengenai ketimpangan KPS Guo dan Kalumbuk.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam pada akhir Agustus hingga awal September 2026, serta dari dokumen data KPS, struktur KPS Guo, dan Laporan TKPSDA Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman Periode Lanjutan TA 2025. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan pengelolaan DAS Batang Kuranji, data monografi wilayah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Nurdin & Hartati, 2019).

### Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, dengan pertanyaan lanjutan yang dikembangkan secara fleksibel untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Kedua, dokumentasi berupa laporan kegiatan, peraturan, data monografi wilayah, foto, dan publikasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Batang Kuranji sebagai

data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara. Alat yang digunakan berupa buku catatan, alat perekam suara pada telepon genggam, dan kamera.

**Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi hasil wawancara dan dokumentasi dari informan yang memiliki posisi berbeda, yakni BWS Sumatera V Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pengurus KPS, tokoh adat, dan masyarakat sekitar DAS Batang Kuranji (Sugiyono, 2023; Moleong, 2017).

**Teknik Analisis Data**

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data wawancara dan dokumentasi ke dalam kategori sesuai fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan bagan agar informasi tersaji secara sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan data dan mengujinya kembali melalui pengecekan dengan fakta di lapangan. Analisis diarahkan pada empat indikator partisipasi masyarakat menurut Rismanita & Pradana, (2022), Wulandari et al. (2022), Haryono et al. (2024), dan Mustofa (2026), sedangkan faktor pendukung dan penghambat ditafsirkan sebagai cerminan modal sosial masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemerintah. Proses coding dilakukan melalui open coding, axial coding, dan selective coding: transkrip wawancara diberi kode awal berdasarkan empat indikator, kode dikelompokkan ke tema bentuk, tingkat, jalur, musyawarah/evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat, lalu diverifikasi melalui triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan DAS Batang Kuranji Kota Padang

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji dianalisis menggunakan empat indikator, yaitu bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, partisipasi langsung dan tidak langsung, serta keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup beragam tetapi belum merata di sepanjang 32 kilometer aliran sungai. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sepanjang DAS Batang Kuranji cukup bervariasi. Wilayah hilir seperti Kelurahan Kuranji dan Gunung Nago memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan mata pencaharian dominan sebagai pedagang dan buruh, sedangkan wilayah tengah dan hulu seperti Kalumbuk dan Guo didominasi oleh petani dan pemilik lahan. Perbedaan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi ini turut mempengaruhi pola dan intensitas partisipasi masyarakat, di mana wilayah dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih baik cenderung memiliki partisipasi yang lebih aktif. BWS Sumatera V berperan sebagai instansi teknis yang membentuk KPS sebagai strategi kelembagaan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus melibatkan masyarakat melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), Padat

Karya Tunai (PKT), dan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) sungai. Dinas Lingkungan Hidup memperluas cakupan pelibatan melalui sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, kanal pengaduan resmi, serta kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, model kelembagaan ini tidak berjalan seragam sehingga keberhasilannya di satu wilayah belum dapat digeneralisasi ke seluruh DAS.

Pada indikator bentuk partisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk yang paling dominan adalah partisipasi tenaga, yang terwujud melalui gotong royong membersihkan sungai, penanaman pohon, reboisasi, susur sungai, serta keterlibatan warga sebagai tenaga kerja dalam PKT dan OP, misalnya pada pembangunan sabo dam. Partisipasi tenaga menjadi kontribusi yang paling realists karena masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya finansial (Haryono et al., 2024). Ketua KPS Guo menyatakan bahwa kontribusi komunitasnya memang hanya berupa tenaga dan pemikiran, sementara kebutuhan biaya dan dukungan teknis diharapkan berasal dari pemerintah. Intensitas partisipasi tenaga ini berbeda antarwilayah. KPS Guo rutin melaksanakan penanaman pohon dan aksi bersih sungai bersama pemuda dan anggota komunitasnya, sedangkan di Kalumbuk kegiatan hanya berupa bersih sungai skala kecil melalui gotong royong tingkat RT dan RW tanpa penanaman kembali maupun pembibitan ikan.

Partisipasi dana hampir tidak ditemukan dalam program pengelolaan DAS yang difasilitasi BWS. Minimnya partisipasi dana dan material ini dapat dijelaskan melalui kondisi ekonomi masyarakat di sepanjang DAS Batang Kuranji yang sebagian besar berada pada kategori menengah ke bawah. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga menjadikan kontribusi finansial untuk pengelolaan lingkungan sulit dilakukan. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi yang mendasar antara pemerintah dan komunitas: BWS mengasumsikan bahwa setiap komunitas memiliki pendanaan mandiri melalui iuran anggota yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART), tetapi Ketua KPS Guo menyatakan komunitasnya tidak memiliki pemasukan tetap dari iuran, dan dana yang ada hanya berasal dari pengelolaan objek wisata lokal yang dialokasikan untuk fasilitas umum, bukan untuk pengelolaan DAS. Di Kalumbuk, pendanaan kegiatan bila ada ditempuh melalui kelurahan yang bekerja sama dengan anggota dewan, bukan melalui iuran mandiri. Masyarakat secara individual pun mengaku tidak pernah memberi maupun menerima dana kolektif untuk pengelolaan sungai, kecuali dana pribadi untuk kepentingan rumah tangga masing-masing. Dengan demikian, asumsi tunggal mengenai kemandirian finansial komunitas tidak berlaku merata di sepanjang DAS Batang Kuranji.

Partisipasi material terlihat dalam skala terbatas, misalnya pemanfaatan alat dan sarana milik masyarakat untuk gotong royong sebagaimana disebutkan Ketua KPS Guo, serta kontribusi berupa bibit tanaman, peralatan kebersihan, dan kendaraan pengangkut sebagaimana dijelaskan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun partisipasi gagasan tercermin dari masukan masyarakat mengenai kondisi historis sungai, titik rawan bencana, dan usulan prioritas pembangunan infrastruktur. KPS Guo, misalnya, menunjuk lokasi tebing kritis yang mendesak ditangani pascabanjir bandang dan keberatannya diterima, sedangkan warga memberikan informasi kepemilikan lahan sebagai dasar penetapan garis sempadan sepanjang lima puluh meter dari tepi sungai. Tokoh adat juga menyampaikan gagasan kritis bahwa kerusakan lingkungan banyak

bersumber dari kebijakan perizinan yang belum konsisten menegakkan tata ruang di sempadan sungai, meskipun gagasan ini belum banyak diakomodasi dalam kebijakan formal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji masih didominasi kontribusi nonfinansial berupa tenaga dan gagasan, sedangkan partisipasi dana dan material sangat minim, tidak seragam mekanismenya antar wilayah, dan bergantung pada dukungan eksternal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mumpuni et al. (2020) pada Sungai Pepe, Sungai Anyar, dan Sungai Premulung di Kota Surakarta yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sungai lebih dominan pada bentuk tenaga dan gagasan, sementara partisipasi dana dan material terkendala oleh keterbatasan ekonomi masyarakat. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi finansial juga dipengaruhi oleh perbedaan persepsi antara pemerintah dan komunitas mengenai kemandirian pendanaan.

Pada indikator tingkat partisipasi, penyampaian informasi oleh BWS bersifat segmentatif, yaitu hanya kepada warga di sekitar lokasi kegiatan yang sedang berjalan dan bukan di seluruh aliran sungai, melalui jalur berjenjang dari camat, lurah, hingga RT dan RW. Dinas Lingkungan Hidup mengakui pemerataan informasi belum tercapai karena keterbatasan akses informasi digital sebagian masyarakat dan rendahnya kehadiran dalam forum sosialisasi. Ketua KPS Guo menambahkan bahwa surat pemberitahuan pemerintah umumnya hanya menjangkau tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, dan RT/RW, sehingga tidak menjamin informasi diteruskan kepada seluruh warga. Kondisi yang lebih ekstrem ditemukan di Kalumbuk, tempat Ketua KPS memperkirakan pemahaman warga terhadap informasi pengelolaan sungai hanya sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen, sementara tokoh adat dan warga mengaku belum pernah menerima informasi mengenai rencana dan pelaksanaan program pengelolaan DAS di wilayah mereka.

Pada tahap konsultasi, BWS dan Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa sosialisasi, musyawarah, dan survei lapangan dilakukan sebelum program dilaksanakan, khususnya program yang berdampak langsung pada masyarakat. KPS Guo mengonfirmasi keterlibatannya dalam diskusi kelompok terarah, sedangkan masyarakat Kalumbuk mengaku tidak pernah dilibatkan dalam forum konsultasi terkait pengelolaan Batang Kuranji secara khusus. Pada tahap pengambilan keputusan, BWS dan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa keputusan bukan bersifat sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, terutama dalam relokasi warga terdampak banjir bandang, dan tokoh adat berperan menyediakan lahan pengganti bagi warga terdampak. Akan tetapi, gambaran ini tidak berlaku bagi wilayah di luar episentrum bencana, karena Ketua KPS Kalumbuk menyatakan warganya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Batang Kuranji. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi masyarakat sering kali baru mencapai kategori konsultatif dan belum kolaboratif penuh (Mustofa, 2026), serta bahwa keterlibatan dalam forum tidak otomatis mencerminkan kualitas partisipasi (Wafa et al., 2024). Dalam kerangka Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji masih berada pada kategori tokenisme, yaitu pada level informing dan consultation, belum mencapai tingkat partnership atau citizen control. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa keputusan strategis mengenai program pengelolaan sungai masih didominasi oleh pemerintah, sementara masyarakat lebih banyak

dilibatkan pada tahap implementasi teknis. Dengan demikian, tingkat partisipasi meningkat bertahap dari informasi menuju konsultasi dan keputusan, tetapi sangat bergantung pada konteks lokasi dan momentum kejadian. Karena keberhasilannya bertumpu pada inisiatif masing-masing komunitas dan bukan pada sistem pembinaan yang merata dan terstruktur, tingkat partisipasi secara kualitatif masih tergolong rendah.

Pada indikator partisipasi langsung dan tidak langsung, partisipasi langsung paling jelas tergambar melalui keterlibatan warga dalam kegiatan fisik KPS seperti penanaman pohon dan bersih sungai, dalam PKT sebagai tenaga kerja pembangunan fisik, serta dalam forum TKPSDA yang mengundang masyarakat membahas isu pengelolaan sungai secara tatap muka bersama unsur pemerintah. Ketua KPS Guo menyebut bahwa komunitasnya merupakan hasil pembinaan BWS dan telah beberapa kali mendapatkan pelatihan menjaga kawasan hulu sungai, sedangkan Ketua KPS Kalumbuk menyatakan komunitasnya tidak pernah diajak dalam kegiatan yang berkaitan khusus dengan Batang Kuranji. Partisipasi tidak langsung diwujudkan melalui aplikasi Span Lapor dan situs Sistem Informasi Simalin milik BWS untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan tanpa kehadiran fisik, serta melalui surat resmi dan penyampaian aspirasi lewat tokoh adat seperti ninik mamak. Ketua KPS Guo menjelaskan bahwa dalam budaya Minangkabau, setiap usulan kepada pemerintah lazimnya disampaikan melalui surat resmi sesuai falsafah bajanjang naiak batanggo turun, karena surat menjadi bukti administratif bagi kedua belah pihak. Kedua pola ini pada praktiknya lebih sering menjadi alternatif satu sama lain daripada saling melengkapi. Partisipasi langsung terkonsentrasi pada wilayah dengan komunitas aktif seperti Guo, sedangkan jalur tidak langsung melalui mekanisme formal menjadi satu-satunya saluran bagi wilayah dengan komunitas tidak aktif seperti Kalumbuk. Ketimpangan partisipasi antarwilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, perbedaan kapasitas kelembagaan KPS, di mana KPS Guo memiliki pengurus yang aktif dan kemitraan dengan akademisi, sedangkan KPS Kalumbuk mengalami kekosongan kepengurusan; kedua, perbedaan kedekatan geografis dengan pusat kegiatan pemerintah, di mana wilayah Guo lebih sering menjadi lokasi proyek prioritas; dan ketiga, perbedaan akses informasi dan tingkat pendidikan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ginting et al. (2024) yang menemukan bahwa faktor kapasitas kelembagaan lokal dan akses terhadap informasi merupakan determinan utama partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Pada indikator keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi, BWS menjelaskan bahwa setiap sosialisasi pembangunan disertai berita acara yang memuat isi kesepakatan dan ditandatangani seluruh peserta yang hadir, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menambahkan bahwa masukan masyarakat dicatat dalam berita acara atau notulen, diverifikasi, dan dibahas bersama instansi teknis sebelum diputuskan. KPS Guo terlibat dalam musyawarah penentuan titik prioritas penanganan tebing sungai pascabanjir bandang, sedangkan Ketua KPS Kalumbuk menyatakan bahwa musyawarah yang melibatkan masyarakat terkait Batang Kuranji secara khusus tidak pernah terjadi di wilayahnya dan keterlibatan yang ada hanya berupa gotong royong tanpa forum musyawarah formal. Musyawarah dengan demikian menunjukkan pola ketimpangan geografis yang sama seperti indikator sebelumnya.

Pada aspek evaluasi, data yang ditemukan jauh lebih terbatas. Tidak ada satu pun informan yang menjelaskan adanya mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat setelah suatu program pengelolaan sungai selesai dilaksanakan. BWS bahkan menyampaikan bahwa sosialisasi rutin kepada KPS terhenti selama dua tahun terakhir akibat efisiensi anggaran yang dialihkan untuk penanganan pascabencana, sehingga proses evaluasi bersama komunitas yang mungkin pernah berjalan ikut terhenti. Dengan demikian, siklus partisipasi belum tertutup secara ideal, karena masyarakat dilibatkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan tetapi keterlibatannya cenderung terputus setelah proyek selesai tanpa mekanisme umpan balik untuk menilai keberhasilan maupun kekurangan program. Dalam kerangka Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji baru mencakup dimensi partisipasi dalam implementasi dan penerimaan manfaat, tetapi belum mencakup partisipasi dalam evaluasi. Padahal, evaluasi partisipatif merupakan komponen penting untuk memastikan akuntabilitas dan pembelajaran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, temuan dari keempat indikator tersebut dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Kriteria penilaian Tabel 1: "Belum Seimbang" digunakan apabila bentuk partisipasi didominasi satu jenis kontribusi dan jenis lain minim; "Belum Merata" apabila tingkat partisipasi antarsegmen/wilayah timpang; "Belum Saling Melengkapi" apabila jalur langsung dan tidak langsung tidak berfungsi sebagai alternatif yang saling menguatkan; dan "Siklus Belum Tertutup" apabila tidak ada mekanisme evaluasi partisipatif pascaprogram. Penilaian ini bersifat kualitatif-analitis berdasarkan pola data wawancara dan dokumen, bukan skor kuantitatif.

**Tabel 1.** Ringkasan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Batang Kuranji Berdasarkan Empat Indikator

| No | Indikator | Hasil Penelitian | Penilaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Bentuk partisipasi | Didominasi tenaga (gotong royong, penanaman pohon, PKT, OP) dan gagasan (usulan lokasi prioritas, informasi kepemilikan lahan). Partisipasi dana dan material sangat minim. | Belum Seimbang |
| 2 | Tingkat partisipasi | Meningkat bertahap dari informasi, konsultasi, hingga keputusan, tetapi timpang antara wilayah dengan KPS aktif (Guo) dan tidak aktif (Kalumbuk). Informasi disampaikan secara segmentatif. | Belum Merata |
| 3 | Partisipasi langsung dan tidak langsung | Partisipasi langsung (KPS, PKT, TKPSDA) terkonsentrasi pada wilayah KPS aktif. Jalur tidak langsung (Span Lapor, Simalin, surat resmi) menjadi satu-satunya saluran bagi wilayah KPS tidak aktif. | Belum Saling Melengkapi |
| 4 | Keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi | Musyawarah tercatat dalam berita acara tetapi tidak merata antarwilayah. Evaluasi partisipatif pascaprogram hampir tidak ditemukan. | Siklus Belum Tertutup |

Sumber: Data olahan peneliti, 2026

Dalam tangga Arnstein (1969), partisipasi di KPS Guo berada pada level consultation hingga placation, karena masyarakat diberi informasi, dimintai pendapat, dan sebagian usulan diakomodasi, tetapi keputusan strategis tetap dominan di pemerintah. KPS Kalumbuk berada pada level informing, karena keterlibatan terbatas pada penerimaan informasi dan gotong royong tanpa ruang konsultasi formal. Keduanya belum mencapai partnership karena belum ada redistribusi kewenangan, kontrol anggaran, atau keputusan bersama yang setara antara pemerintah dan komunitas.

Relasi kuasa dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji masih asimetris. Bukti power sharing terbatas pada penentuan titik prioritas tebing dan berita acara kesepakatan; masyarakat belum memiliki kendali atas anggaran, perencanaan strategis, dan evaluasi. Arnstein menekankan bahwa partisipasi sejati menuntut redistribusi kekuasaan, sehingga temuan ini memperkuat argumen bahwa partisipasi baru bersifat tokenisme.

**Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Batang Kuranji**

Faktor pendukung dan penghambat ditafsirkan sebagai cerminan sejauh mana kesiapan sosial masyarakat dan kesiapan kelembagaan pemerintah telah terpenuhi dalam mendukung keberlanjutan partisipasi. Variasi partisipasi antarwilayah dipengaruhi oleh sistem perencanaan partisipatif, kapasitas kelembagaan, dan komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang keterlibatan warga (Mahlella, 2025), serta oleh tingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat (Wafa et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor pendukung utama. Pertama, keberadaan KPS dan tokoh masyarakat yang aktif, sebagaimana KPS Guo yang mendapat pembinaan rutin dari BWS, bermitra dengan Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, dan dilibatkan dalam diskusi penentuan lokasi prioritas penanganan tebing. Kedua, budaya gotong royong yang mengakar dan menjadi dasar partisipasi tenaga. Ketiga, kesadaran kolektif yang tumbuh dari pengalaman historis banjir bandang yang berulang di kawasan DAS. Keempat, keterbukaan sebagian pemerintah untuk berkolaborasi, yang terlihat dari forum TKPSDA, pencatatan kesepakatan dalam berita acara, diterimanya keberatan warga, dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dengan akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat sesungguhnya sudah cukup terbangun.

Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan lima faktor penghambat utama. Pertama, keterbatasan anggaran pembinaan KPS, karena anggaran sosialisasi KPS dipangkas atau diefisienkan dan dialihkan untuk penanganan pascabencana yang dinilai lebih mendesak. Kedua, perbedaan persepsi mengenai kemandirian pendanaan komunitas, karena BWS mengasumsikan adanya iuran mandiri sedangkan KPS tidak memiliki sumber pemasukan tetap. Ketiga, terbatasnya kewenangan BWS dalam mendorong keaktifan komunitas yang telah memiliki legalitas dan ADART sendiri, sehingga peran BWS terbatas pada imbauan. Keempat, keterbatasan ekonomi masyarakat yang mendorong permukiman di sempadan sungai, serta rendahnya pengetahuan teknis masyarakat mengenai dampak aktivitas seperti pengambilan pasir dan batu terhadap risiko sedimentasi dan banjir. Kelima, pemerataan informasi dan distribusi program yang belum optimal, sehingga wilayah

di luar prioritas proyek hampir tidak tersentuh program pembinaan. Kombinasi keterbatasan anggaran BWS dan tidak adanya mekanisme pembinaan yang mengikat inilah yang menjadi akar utama perbedaan tingkat partisipasi antarwilayah, sebagaimana tercermin pada kesenjangan antara KPS Guo dan KPS Kalumbuk.

Dari uraian faktor pendukung dan penghambat tersebut, dapat dinilai bahwa temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi BWS Sumatera V dan Pemerintah Kota Padang. Kerangka kelembagaan partisipasi dari sisi kebijakan BWS sudah cukup jelas, tetapi implementasinya di lapangan sangat bergantung pada faktor lokal, terutama keaktifan KPS di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penguatan anggaran pembinaan, pemerataan informasi, dan mekanisme evaluasi partisipatif diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak berhenti pada momentum bencana, disertai konsistensi penegakan tata ruang di kawasan sempadan sungai sebagaimana disoroti tokoh adat.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temuan penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan yang signifikan. Mutia dan Muchtar (2019) dalam studinya pada KPS Kalumbuk menemukan bahwa komunitas peduli lingkungan memiliki peran penting dalam melestarikan lingkungan aliran Sungai Batang Kuranji, tetapi penelitian tersebut tidak menganalisis secara spesifik bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberadaan KPS saja tidak cukup untuk menjamin partisipasi yang merata, karena diperlukan dukungan anggaran, pembinaan yang berkelanjutan, dan mekanisme evaluasi partisipatif. Sementara itu, Astomo (2021) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Mandar menemukan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat formalitas dan belum mencapai partisipasi substantif. Temuan penelitian ini memperkuat kesimpulan tersebut dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji juga masih berada pada level tokenisme, belum mencapai partisipasi kolaboratif penuh. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus analisis yang membandingkan dua KPS dengan tingkat keaktifan berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan partisipasi antarwilayah secara lebih spesifik.

Selain implikasi tersebut, hasil penelitian ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan cakupannya. Pertama, informan berjumlah enam orang dan perbandingan komunitas hanya melibatkan dua dari lima KPS, sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasikan ke seluruh segmen DAS Batang Kuranji. Kedua, pembahasan berfokus pada partisipasi masyarakat yang difasilitasi BWS Sumatera V, sehingga bentuk partisipasi mandiri di luar program BWS belum tergambar secara menyeluruh. Ketiga, data mengenai evaluasi partisipatif pascaprogram sangat terbatas sehingga aspek ini perlu didalami pada penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan jumlah KPS yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji yang difasilitasi BWS Sumatera V Padang telah terwujud dalam berbagai bentuk, tetapi pelaksanaannya belum optimal dan belum

merata di sepanjang 32 kilometer aliran sungai. Dari keempat indikator, bentuk partisipasi paling dominan adalah tenaga dan gagasan, seperti gotong royong, penanaman pohon, reboisasi, susur sungai, PKT, OP, serta usulan lokasi prioritas dan informasi kepemilikan lahan, sedangkan partisipasi dana dan material sangat minim karena KPS tidak memiliki sumber pemasukan tetap dan terdapat perbedaan persepsi mengenai kemandirian pendanaan. Tingkat partisipasi meningkat bertahap dari penyampaian informasi, konsultasi, hingga pengambilan keputusan, tetapi masih bersifat tokenisme dan belum mencapai kemitraan penuh; partisipasi langsung terkonsentrasi pada wilayah dengan KPS aktif seperti Guo, sementara wilayah dengan KPS tidak aktif seperti Kalumbuk lebih mengandalkan jalur tidak langsung berupa surat resmi, Span Lapor, dan Simalin. Keterlibatan dalam musyawarah belum merata, dan evaluasi partisipatif pascaprogram hampir tidak ditemukan, sehingga siklus partisipasi belum tertutup secara ideal.

Faktor pendukung partisipasi meliputi keberadaan KPS dan tokoh masyarakat yang aktif, budaya gotong royong, kesadaran kolektif akibat pengalaman bencana banjir bandang, serta keterbukaan sebagian pemerintah untuk berkolaborasi. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran pembinaan KPS yang dialihkan untuk penanganan pascabencana, kesenjangan persepsi mengenai kemandirian pendanaan, keterbatasan ekonomi dan pengetahuan teknis masyarakat, serta pemerataan informasi dan distribusi program yang belum optimal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batang Kuranji belum berjalan secara merata, berkelanjutan, dan partisipatif-substantif; kualitasnya masih ditentukan oleh keaktifan komunitas lokal dan momentum bencana, bukan oleh sistem pembinaan yang terstruktur. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran, tetapi juga dari akses informasi, ruang konsultasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, BWS Sumatera V Padang disarankan mengalokasikan anggaran rutin untuk pembinaan KPS, tidak hanya pada saat pascabencana, serta menyusun skema pendanaan alternatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah karena mekanisme iuran mandiri terbukti tidak berjalan; BWS juga perlu memperluas sosialisasi dan konsultasi publik ke seluruh segmen DAS, tidak hanya pada wilayah proyek prioritas, membangun mekanisme evaluasi partisipatif pascaprogram, dan memberikan pendampingan khusus bagi KPS tidak aktif seperti Kalumbuk, sementara KPS aktif seperti Guo didorong memperluas kemitraan dan berbagi praktik baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi lintas instansi agar informasi pengelolaan sungai menjangkau masyarakat lebih luas, menegakkan aturan tata ruang di kawasan sempadan sungai secara konsisten, serta mendorong peningkatan pengetahuan teknis masyarakat mengenai dampak pengambilan pasir dan batu terhadap sedimentasi dan banjir. Masyarakat diharapkan lebih aktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi dan terlibat dalam forum musyawarah, sedangkan peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan jumlah KPS serta mendalami aspek evaluasi partisipatif pascaprogram.

**REFERENSI**


Agusti, V. N., & Wibawani, S. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di kampung edukasi sampah. *NeoRespublca: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 111–123. https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.119

Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 149-158. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p149-158

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Asdak, C. (2023). *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*. Gadjah Mada University Press.

Astomo, P. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mandar berorientasi lingkungan hidup. *Mimbar Hukum*, 33(1), 216–241.

Azmi, M. A. M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (analisis dampak dan manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 326–341. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X

Fajeriadi, H., Fahmi, Arisandi, R., Nugroho, B. A., & Fitriani, A. (2024). Analisis kritis edukasi pengelolaan sampah berbasis lingkungan kepada masyarakat sekitar sungai. *Seribu Sungai: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 30–37. https://doi.org/10.20527/seru/v2i2/346

Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublca: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129. https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084

Handiny, F., & Ulva, F. (2025). Transformasi limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi di Kelurahan Kuranji. *Jurnal Abdidas*, 6(1), 107–112. https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i1.1115

Haryono, I., Soesilo, T. E. B., & Agustina, H. (2024). Pengaruh perilaku dan kondisi permukiman masyarakat terhadap kualitas air di Sungai Jangkok, Kota Mataram. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, *23*(1), 73-83.

Machmud, J., Imbran, H. H., & Gaib, R. (2025). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (Studi kasus Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango). *Akademika: Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 14(2). https://doi.org/10.31314/akademika.v14i2.5019

Mahlella, N. (2025). Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 27–34.

Maryani, E., & Putra, R. (2024). Integrated watershed management and community participation: A systematic review. *International Journal of Environmental Science and Development*, 15(2), 89–101. https://doi.org/10.18178/ijesd.2024.15.2.1234

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mumpuni, A., Rahayu, P., & Rini, E. F. (2020). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sungai (Studi kasus: Sungai Pepe, Sungai Anyar, dan Sungai Premulung, Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, *15*(1), 67-80. https://doi.org/10.20961/region.v15i1.24976

Mustofa, A. (2026). Kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan: Antara formalitas dan substansi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(1), 1–15.

Mutia, U., & Muchtar, H. (2019). Komunitas peduli lingkungan dalam melestarikan lingkungan aliran Sungai Batang Kuranji (Studi pada Komunitas Peduli Sungai Kalumbuk Kota Padang). *Journal of Civic Education*, 1(4), 444–450. https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.307

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2025–2029.

Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Suhendra, A., Millenia, Y., B, J., & Alaydrus, A. (2024). Strategi pemerintah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Kalimantan Timur. *NeoRespublia: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1031–1044. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.294

Wulandari, A. D., Isyandi, B., & Ekowrso, H. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, *15*(1), 72-87. https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7426

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wafa, A., Siswanto, E., Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2024). Partisipasi masyarakat dalam kualitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Panduman Tahun 2020–2025. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(4), 427–439. https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.963

Yunginger, R., & Patuti, I. M. (2025). Pendampingan partisipasi masyarakat dalam pemetaan IMAP untuk peningkatan kualitas infrastruktur permukiman berkelanjutan. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 371–380. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i1.5213

Zulhadi, Z., Pitono, A., & Wargadinata, E. L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), 1244-1255.

Zulkarnaen, Z. (2023). Colaborative Governance: Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Alam Kota Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 59-75. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.15322